

ABSTRAK

Anisa Fitri Wulansari: *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Perempuan yang Bekerja pada Shift Malam di Kalaras Urban Town dihubungkan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003*

Perlindungan terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam merupakan isu yang krusial mengingat tingginya potensi risiko yang dihadapi, baik dari segi kesehatan, keamanan, maupun kesejahteraan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas mengatur kewajiban pengusaha untuk memberikan perlindungan khusus bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari. Namun, dalam praktiknya, Kalaras Urban Town belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam di Kalaras Urban Town ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, mengetahui faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam di Kalaras Urban Town, serta menganalisis perlindungan hukum dari faktor-faktor penghambat dalam pemenuhan hak pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam di Kalaras Urban Town.

Penelitian ini mengacu pada teori HAM yang menegaskan bahwa setiap pekerja, termasuk perempuan yang bekerja pada shift malam, memiliki hak yang melekat untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Teori perlindungan hukum digunakan untuk menelaah bagaimana negara melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, memberikan jaminan perlindungan terhadap pekerja perempuan. Sementara itu, teori hukum responsif digunakan untuk mengkaji sejauh mana implementasi perlindungan tersebut mampu menyesuaikan dengan kebutuhan nyata di masyarakat, serta mendorong keberpihakan hukum kepada kelompok rentan seperti pekerja perempuan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, yang mengkaji peraturan perundang-undangan berdasarkan teori hukum dan praktik pelaksanaannya. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan untuk menganalisis pelaksanaan peraturan serta gejala hukum. Penelitian ini dilakukan di Kalaras Urban Town.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 telah jelas mengatur kewajiban perlindungan, implementasinya di Kalaras Urban Town masih belum optimal. Beberapa ketentuan seperti penyediaan makanan bergizi dan angkutan antar jemput belum terpenuhi. Faktor yang menghambat adalah tidak ada sosialisasi dari pengusaha, minimnya pengawasan dari pemerintah, normalisasi tidak menyediakan fasilitas angkutan antar jemput, serta menilai penyediaan makanan ringan sudah menjadi bentuk pemenuhan tanggung jawab secara moral. Hal ini karena minimnya kesadaran perusahaan, tidak ada pengawasan dan sosialisasi aktif dari pihak pemerintah, anggapan umum bahwa penyediaan makanan bergizi atau angkutan antar jemput malam, sepenuhnya berada di tangan pekerja turut memperkuat praktik yang kurang berpihak pada perlindungan tenaga kerja perempuan.

Kata Kunci: Pekerja Perempuan, Perlindungan Hukum, Shift Malam